

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin, dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- AR, Mustopadidjaja. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teoritis Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ganie, Ahmad J. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: CV Bayumedia Publishing, 2006.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lalolo, Krina P. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rasyidi, Lilik. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2012.
- Syafrinaldi. *Hukum Laut Internasional*. Pekanbaru: UIR Press, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wasil, Mohammad, dan Feny Rita Fiantika, *et al. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

## B. Artikel Jurnal

- Atmaja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum." *Jurnal Kertha Wicaksana* 2, no. 2 (2018): 146.
- Darsono, Prapto. "Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan." *Oseana* XXI, no. 4 (1999): 1.
- Latipulhayat. "Khazanah Jeremy Bentham." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 273–74.

### **C. Tesis dan Disertasi**

Aloysius Yanis Dhaniarto, Riama Luciana, dan Sitohang, “Problematika Kegagalan Pelaksanaan Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT): Suatu Analisis Penerapan Asas-Asas Lelang pada Pelaksanaan Lelang BMKT” (Tesis, Universitas Indonesia, 2013).

T. Agus Priyo Waluyo, “Tinjauan Hukum terhadap Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam” (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2015).

Ursula Kristanti Rieng Borot, “Keabsahan Izin Usaha Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Oleh Pihak Asing di Indonesia (Studi Komparatif Australia dan Cina)” (Tesis, Universitas Indonesia, 2023).

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

*Vendu Instructie* (Stbl. 1908 No. 190).

*Vendu Reglement* (Stbl. 1908 No. 189).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115)

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam.

## E. Dokumen Resmi Lainnya

*United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982), 10 Desember 1982, 1833 U.N.T.S. 397.

*United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 (UNESCO Convention 2001).

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2020-2024.

## F. Internet

Ariyanti, F. “Terpendam di 463 Titik, Berapa Nilai Harta Karun di Laut RI?”  
Liputan6.com. Liputan 6, 27 Januari  
2017. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2847024/terpendam-di-463-titik-berapa-nilai-harta-karun-di-laut-ri> (diakses 27 Januari 2026).

Berita DJKN. “Pemerintah Indonesia Melelang BMKT Cirebon.”  
djkn.kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara, 7 April  
2010. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/1852/Pemerintah-Indonesia-Melelang-BMKT-Cirebon.html> (diakses 11 November 2025).

Berita DJKN. “Menguak Sejarah dari Dasar Laut Melalui BMKT.”  
djkn.kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara, 16 Agustus  
2018. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/17537/Menguak-Sejarah-dari-Dasar-Laut-Melalui-BMKT.html> (diakses 2 Januari 2026).

Dimas Aulia Tanaya. “Manfaat Lelang untuk Kita dan Negara Kita.”  
djkn.kemenkeu.go.id. DJKN Kemenkeu, 2 Maret  
2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jakarta2/baca->

[artikel/14785/Manfaat-Lelang-untuk-Kita-dan-Negara](#)(diakses 13 September 2025).

FAQ Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). kkp.go.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/artikel/2639-faq-barang-muatan-kapal-tenggelam-bmkt> (diakses 12 November 2025).

KKP Kelola BMKT Melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. kkp.go.id. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/6192-kkp-kelola-bmkt-melalui-standar-kompetensi-kerja-nasional-indonesia> (diakses 11 Januari 2026).

Liputan Enam. “Menteri Susi: Penjualan Harta Karun Bawah Laut RI itu Illegal.” Liputan6.com. Liputan 6, 17 Maret 2017. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2885231/menteri-susi-penjualan-harta-karun-bawah-laut-ri-itu-ilegal> (diakses 5 Januari 2026).

## G. Wawancara Narasumber

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jasa Kelautan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia